

## ANALISIS PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 2014-2023

<sup>1</sup> Alvina Indri Iswara, <sup>2</sup> Ismadiyah Purwaning Astuti

Program Studi S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Sosial,  
Universitas AMIKOM Yogyakarta

<sup>1</sup> [alvinaindri@students.amikom.ac.id](mailto:alvinaindri@students.amikom.ac.id) <sup>2</sup> [ismadiyah@amikom.ac.id](mailto:ismadiyah@amikom.ac.id)

### ABSTRACT

Central Java is one of the provinces in Indonesia, which has a strategic role in building the national economy. However, the minimum wage in Central Java Province is the lowest in Java. This study aims to determine the effect of the Human Development Index (HDI), Labor Force Participation Rate (TPAK), and Consumer Price Index (CPI) on the determination of district / city minimum wages in Central Java in 2014-2023. This study uses panel data consisting of 35 districts / cities in Central Java Province and in the period 2014-2023 sourced from BPS Central Java. This research uses panel data regression analysis method. The results of the analysis show that HDI and TPAK have a positive and significant effect on minimum wages in Central Java, while CPI has a negative and significant effect on minimum wages in Central Java. The findings encourage the Central Java government to increase HDI by improving access to education, health and quality of life in an effort to increase people's productivity and income. The government needs to provide skills training to increase labor force participation. In addition, the government needs to pay attention to the effect of CPI on MSEs by managing inflation wisely to maintain price balance and people's purchasing power.

**Keywords:** District Minimum Wage, Human Development Index, Labor Force Participation Rate, Consumer Price Index

### ABSTRAK

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian nasional. Namun, upah minimum di Provinsi Jawa Tengah, berada pada posisi terendah di Pulau Jawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2014-2023. Dalam penelitian ini menggunakan data panel terdiri dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dan pada periode tahun 2014-2023 yang bersumber dari BPS Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel. Hasil analisis menunjukkan bahwa IPM dan TPAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum di Jawa Tengah, sementara IHK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum di Jawa Tengah. Temuan ini mendorong pemerintah Jawa Tengah agar meningkatkan IPM dengan memperbaiki akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan pelatihan keterampilan guna upaya meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan pengaruh IHK terhadap UMK dengan mengelola inflasi secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan harga dan daya beli masyarakat.

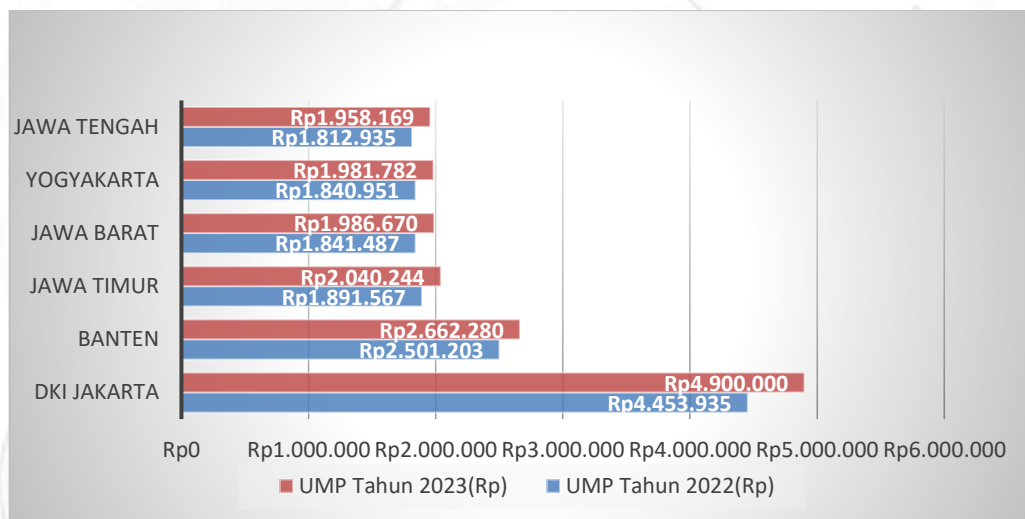
**Kata kunci :** Upah Minimum Kabupaten/Kota, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Harga Konsumen

## PENDAHULUAN

Upah menjadi salah satu indikator penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan pekerja. Menurut penelitian Damanik & Zalukhu (2021), upah merupakan semua jenis pembayaran yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kontrak kerja, tanpa memandang jenis pekerjaan atau denominasinya. Upah menunjukkan jumlah uang yang diterima oleh pekerja sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka yang diberikan secara tunai atau tidak tunai. Upah juga berperan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi karena upah yang diterima oleh pekerja berdampak langsung dalam kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok secara memadai (Ramdhansya & Indrawati, 2022).

Dengan demikian, upah yang layak dapat mendorong daya beli masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kenaikan permintaan konsumen sehingga terciptanya perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu memastikan upah minimum yang memadai adalah salah satu langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan stabil. Ini karena ketidaksetaraan ekonomi yang besar dapat menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik sosial yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Messina & Silva, 2021).

Jawa Tengah, berperan penting dalam perekonomian nasional. Terletak di tengah Pulau Jawa, terdiri 35 kabupaten/kota, provinsi ini tidak hanya menjadi pusat ekonomi, tetapi juga pusat budaya dan pendidikan yang strategis untuk pembangunan bangsa. Dengan karakteristik yang beragam dari perkotaan hingga pedesaan. Jawa Tengah memiliki permasalahan terkait tingkat upah minimum yang rendah. Dengan konteks tersebut, berikut adalah gambaran kondisi upah minimum di Pulau Jawa pada tahun 2022-2023.



Sumber: BPS Indonesia tahun, 2023.

Gambar 1 Grafik Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa 2022-2023

Dalam gambar yang tercantum diatas, terlihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah pada tahun 2022 sampai 2023 berada pada urutan terakhir dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan UMP Rp 1.958.169 dari sebelumnya Rp 1.812.935 pada tahun 2022. Perlu diperhatikan bahwa UMP Jawa Tengah masih berada di bawah provinsi-sebanding seperti Jawa Barat (Jabar) dengan UMP Rp 1.986.670, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan UMP Rp 1.981.782 pada tahun 2023. UMP tertinggi di Pulau Jawa tercatat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dengan besaran Rp 4.453.935. Perekonomian dan ketenagakerjaan di wilayah Jawa Tengah menuntut perhatian pemerintah daerah untuk merancang strategi dan kebijakan yang cermat guna menjaga keseimbangan serta keadilan dalam sektor ketenagakerjaan demi pembangunan ekonomi yang inklusif.

Dalam mengevaluasi pembangunan ekonomi suatu wilayah, penting untuk memperhatikan seberapa layak upah yang diberikan kepada pekerja di Jawa Tengah. Langkah ini dihubungkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Helvira &

Rizki (2020) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi penanda kualitas hidup yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat secara keseluruhan yang mencerminkan kesejahteraan dan perkembangan manusia di suatu wilayah. Menurut data Badan Pusat Statistik, Jawa Tengah menyajikan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa, dengan nilai mencapai 73,39%. Sedangkan, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan angka yang lebih tinggi, masing-masing dengan IPM 74,65%, 74,24%, 75,77%, dan 81,09%. DKI Jakarta memiliki nilai IPM tertinggi, mencapai 83,55%.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beriringan dengan tingkat upah minimum di Pulau Jawa. Disparitas yang signifikan dalam tingkat pembangunan manusia antar provinsi di Pulau Jawa menjadi jelas. DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan IPM tertinggi, menandakan pembangunan manusia yang maju, Jawa Tengah dengan IPM terendahnya menandakan tantangan besar yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan di wilayah tersebut. Menurut Fauzan et al (2020) menyatakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan buruh menjadi semakin mendesak, sejalan dengan penetapan upah minimum yang lebih memadai untuk mencapai pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Menurut Kusumaningrum & Nurhayati (2023) menyatakan bahwa kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan melalui penetapan upah yang sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja yang dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menjadi indikator petunjuk sejauh mana proporsi penduduk dalam kelompok usia kerja yang aktif mencari pekerjaan atau terlibat dalam aktivitas tenaga kerja yang menggambarkan kondisi dan dinamika ketenagakerjaan (Primadila & Asmara, 2022). Menurut data BPS, pada tahun 2023 Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 21,07 juta orang, bertambah 1,59 juta dibanding 2022.

Bertambahnya angkatan kerja namun tidak diikuti dengan bertumbuhnya tingkat penetapan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah, dapat mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup buruh, serta kurangnya daya beli yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah. Studi yang dilakukan Third et al (2023) menyatakan bahwa angkatan kerja merupakan salah satu pendorong dalam aktivitas ekonomi, hal ini dikarenakan angkatan kerja yang produktif mampu mengembangkan ekonomi dan berpeluang menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian. Kesejahteraan dapat diwujudkan melalui dukungan dan campur tangan pemerintah dengan memfasilitasi kebijakan ketenagakerjaan seperti menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah minimum sebagai pengimplementasian dari pengaturan pengeluaran dan penerimaan pemerintah sebagai kebijakan (Ayuningtyas & Islami, 2022).

Menurut Konarasinghe (2020) menyatakan bahwa efektivitas kebijakan ekonomi negara tercermin melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan memperhitungan fluktuasi harga barang dan jasa menandakan adanya dinamika dan variasi situasi dalam negeri. IHK digunakan sebagai indikator inflasi umum yang mencerminkan harga barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat dalam periode waktu tertentu (Riyani & Citra, 2020). Ketika IHK mengalami kenaikan, daya beli masyarakat cenderung akan menurun hal ini disebabkan biaya hidup yang semakin meningkat. Oleh karena itu, IHK menjadi salah satu faktor penetapan upah minimum sebagai kebijakan pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan ekonomi Masyarakat (Mutmainnah & Mahfiah, 2023).

Di sisi lain, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum & Nurhayati (2023) menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap upah minimum kabupaten/kota, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh negatif terhadap upah minimum kabupaten/kota, ini artinya apabila penawaran tenaga kerja meningkat maka dapat menurunkan upah minimum begitupun sebaliknya jika penawaran tenaga kerja menurun maka upah akan meningkat. Kemudian, pada hasil penelitian Damanik & Zalukhu (2021) variabel IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum dan variabel TPAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap upah



minimum. Menurut penelitian Riyani & Citra (2020) Indeks Harga Konsumen (IHK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum. Tujuan penelitian ini yaitu guna menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2014- 2023.

## **LANDASAN TEORI**

### **Upah**

Berdasarkan pandangan Edwin B. Flippo, upah merupakan nilai untuk jasa yang diberikan seseorang kepada orang lain. Upah seharusnya mencerminkan nilai kontribusi individu terhadap pekerjaan yang dilakukan. Hal ini menekankan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap kualitas kerja dan produktivitas setiap individu. Dalam konteks ini, pengusaha dapat mengembangkan sistem penggajian yang adil dan transparan yang memperhitungkan berbagai faktor seperti keterampilan, pengalaman, dan kinerja karyawan. Menurut G. Reynold menyatakan upah sebagai salah satu dari banyak biaya produksi yang harus dikelola dengan efisien oleh pengusaha. Dalam teori ini, upah dipandang sebagai elemen penting dalam pengendalian biaya produksi. Pengusaha harus berusaha untuk menekan biaya upah sekecil mungkin agar harga produk tidak naik secara signifikan, yang dapat mengurangi daya saing dan permintaan konsumen. Ini mendorong pengusaha untuk mencari cara efisien untuk mengelola tenaga kerja mereka, seperti meningkatkan produktivitas atau menggunakan teknologi yang lebih efisien.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut Helvira & Rizki (2020) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator kualitas hidup masyarakat yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Dengan mempertimbangkan tiga dimensi ini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia suatu wilayah atau negara. Pembangunan manusia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, peningkatan kesejahteraan, dan menciptakan peluang mata pencaharian masyarakat. Ini mencerminkan pendekatan holistik yang fokus pada peningkatan kemampuan manusia dan kesejahteraan (Ladi et al., 2021).

### **Ketenagakerjaan**

Menurut teori klasik Adam Smith, ketenagakerjaan menekankan betapa pentingnya investasi dalam peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja sebagai dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini mencakup elemen seperti pasokan, permintaan, dan kualitas tenaga kerja. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pasokan tenaga kerja, sementara permintaan tenaga kerja oleh perusahaan dipengaruhi oleh produktivitas dan keterampilan tenaga kerja yang relevan. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi perusahaan, tetapi juga membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

### **Harga**

Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa harga sebagai perbandingan antara nilai produk atau jasa dan manfaat yang dirasakan oleh konsumen, bukan hanya jumlah uang yang dibayarkan oleh konsumen untuk membeli produk atau jasa. Dengan kata lain, harga menunjukkan seberapa besar nilai yang diterima konsumen dari produk atau jasa yang mereka peroleh. Akibatnya, strategi penyesuaian harga mempengaruhi kestabilan ekonomi dan perilaku konsumen. Perusahaan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perilaku konsumen, dan dinamika pasar secara keseluruhan dengan melakukan penyesuaian harga yang tepat. Ini menunjukkan bahwa harga juga memainkan peran dalam membentuk lingkungan bisnis dan ekonomi.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Ramli (2024) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif merupakan penggabungan dari ilmu pengetahuan ilmiah, rasionalitas, dan pendekatan empiris berdasarkan hipotesis data. Data yang digunakan terdiri dari upah minimum kabupaten, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan indeks harga konsumen dalam data tahunan. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, diambil dari data yang sudah ada khususnya Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2014 hingga tahun 2023. Variabel dijelaskan oleh peneliti ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 1 Variabel Penelitian dan definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional	Satuan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Tingkat upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2014 - 2023	Rupiah
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persentase indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2014 - 2023	Persen
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persentase penduduk berusia 15 tahun keatas yang merupakan bagian dari angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2014 - 2023	Persen
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk atau rumah tangga pada jangka waktu tertentu di Jawa Tengah tahun 2014 - 2023.	Persen

## Metode Analisis

Model penelitian yang digunakan berupa regresi data panel. Regresi data panel merupakan suatu teknik regresi yang mengintegrasikan data cross section dan data time series. Panel memberikan jumlah observasi yang lebih besar dibandingkan dengan menggunakan data cross section atau data time series secara terpisah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan data cross section yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan data timeseries tahun 2014 hingga 2023 dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak statistik yaitu Eviews 10. Dalam menganalisis regresi data panel menggunakan model ekonometrik sebagai berikut:

$$UMK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 TPAK_{it} + \beta_3 IHK_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

- UMK = Upah Minimum Kabupaten/Kota (ribu rupiah)
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia (%)
- TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (ribu rupiah)
- IHK = Indeks Harga Konsumen (%)
- $\beta_0$  = Konstant
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variabel independent
- i = Kabupaten/kota ke i di Jawa Tengah
- t = Tahun ke t
- e = Residual

## Alat Analisis

Pada penelitian ini, menggunakan 3 alat analisis yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). *Pooled Least Square* (PLS) metode ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi data panel. Pendekatan PLS secara sederhana menggabungkan (pooled) semua data runtun

waktu dan antar ruang, berasumsi bahwa intercept dan slope dianggap sama untuk masing-masing individu dan waktu. Metode ini tidak mempertimbangkan aspek individu atau waktu. *Fixed Effect Model* (FEM) pada metode ini regresi Intersep bervariasi antar individu karena setiap individu dianggap memiliki karakteristik yang unik. Metode ini memasukan variabel dummy guna mengidentifikasi perbedaan intersep antara individu tersebut. *Random Effect Model* (REM) metode ini untuk mengestimasi data panel di mana variabel gangguan (*error terms*) mungkin saling berhubungan antar time series dan cross section. Penggunaan model komponen error dapat membantu memperkirakan hubungan antara variabel-variabel dalam data panel dengan lebih akurat.

### Pengujian Data Panel

Pada penelitian ini, pengujian data panel dilakukan untuk memilih model terbaik dengan uji chow dan uji hausman. Uji chow digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dan model *Pooled Least Square* (PLS). Ketika nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik F lebih besar dari  $\alpha$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, yang berarti model *pooled least square* dipilih. Sebaliknya, ketika nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik F lebih kecil dari  $\alpha$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang berarti *fixed effect model* dipilih. Uji hausman digunakan untuk membandingkan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan *Random Effect Model* (REM). Ketika nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik chi-square lebih besar dari  $\alpha$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, yang berarti *random effect model* dipilih. Sebaliknya, ketika nilai probabilitas atau signifikansi empirik statistik chi-square lebih kecil dari  $\alpha$ , hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak, yang berarti *fixed effect model* dipilih. Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan uji untuk membandingkan *Random Effect Model* (REM) dengan *Common Effect Model* (CEM). Uji LM diperlukan ketika uji chow menunjukkan bahwa model terbaik yang dipilih yaitu *common effect model* sedangkan, pada pengujian hausman menunjukkan bahwa model terbaik adalah *random effect model*, namun apabila uji chow dan uji hausman menunjukkan bahwa model yang paling tepat adalah fixed effect model maka tidak diperlukan uji LM.

### Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, menggunakan 3 jenis uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah adanya hubungan antar variabel bebas atau tidak dalam model. Ketika nilai korelasi antar variabel bebas  $< 0.8$  maka tidak terjadi masalah multikol. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah kesalahan pengganggu mempunyai persamaan dari masing-masing variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi ini digunakan metode uji Glejser jika  $> 0.05$  dengan demikian dapat dinyatakan tidak adanya pelanggaran heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada kelompok atau data variabel apakah sebaran data itu telah berdistribusi normal atau tidak. Ketika nilai probability  $> 0.05$  maka terpenuhi, data memiliki distribusi yang normal. Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui adanya korelasi antara nilai-nilai dalam rangkaian data pada interval waktu tertentu. dalam data panel, autokorelasi tidak diperlukan karena panel data memiliki dimensi tambahan yang merupakan individu atau unit pengamatan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Budi et al (2024) yang menyatakan bahwa uji autokorelasi lebih tepat digunakan pada data seri waktu murni, di mana observasi diambil dari satu variabel dalam urutan waktu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### Regresi Data Panel

Pada penelitian ini diawali dengan melakukan regresi data panel yang digunakan untuk mengestimasi model. Tiga jenis model utama yang digunakan dalam estimasi ini adalah *random effect model*, *fixed effect model*, dan *common effect model*. Hasil estimasi untuk ketiga model tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Regresi Data Panel



Variabel	Common Effect Model		Fixed Effect Model		Random Effect Model	
	(Std.error)	(t.Statistic)	(Std.error)	(t.Statistic)	(Std.error)	(t.Statistic)
C	-2327819 (756893.2)	0.0025 (-3.075492)	-17835962 (578965.0)	0.0000 -30.80663	-10670952 (468510.3)	0.0000 (-22.77634)
IPM	44446.79 (5109.655)	0.0000 (8.698590)	261682.5 (7592.996)	0.0000 (34.46367)	148349.4 (5394.055)	0.0000 (27.50240)
TPAK	2296.869 (7675.003)	0.7651 (0.299266)	13759.46 (4317.750)	0.0018 (3.186719)	17172.13 (4095.776)	0.0052 (4.192643)
IHK	3926.866 (2528.749)	0.1224 (1.552889)	-2552.812 (1053.362)	0.0168 (-2.423490)	3371.204 (990.3742)	0.0008 (3.403969)
F-Statistic	25.44701		66.48281		76.93490	
Prob(F-statistic)	0.000000		0.000000		0.000000	
R-Squared	0.323012		0.951274		0.590588	
Adj R-Squaed	0.310319		0.936965		0.582912	

Sumber: Olah Data Eviews 10

### Uji Pemilihan Model

Uji pemilihan model adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan model statistik yang paling sesuai dalam menganalisis data penelitian ini. Prosedur ini berguna untuk mengetahui model terbaik dari *common effect model*, *fixed effect model*, *random effect model*. Masing-masing model dibandingkan dengan menggunakan chow test dan hausman test. Chow test digunakan untuk memilih model terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*. Hausman test digunakan untuk memilih model terbaik antara *fixed effect model* dan *random effect model*.

Tabel 3 Uji Pemilihan Model

Uji model	Statistic	Prob > Chi-square	Model Terpilih
Chow Test	47.782306	0.0000	Fixed Effect Model
Hausman Test	461.423764	0.0000	Fixed Effect Model

Sumber: Olah Data Eviews 10

Dari hasil analisis pada Tabel 3, *chow test* menunjukkan bahwa probabilitasnya adalah  $0,0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Hasil *hausman test* menunjukkan bahwa probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ , maka model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Pada tabel berikutnya menyajikan *fixed effect model* sebagai model yang terpilih.

Tabel 4 Model Terpilih

Variabel	Coef.	Std.E	t-Statistic	Prob.
C	-17835962	578965.0	-30.80663	0.0000
IPM	261682.5	7592.996	34.46367	0.0000
TPAK	13759.46	4317.750	3.186719	0.0018
IHK	-2552.812	1.053.362	-2.423.490	0.0168
R-Squared	0.951274			
Adjusted R-squared	0.936965			
F-Statistic	66.48281			
Prob (F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah Data Eviews 10

Dari hasil analisis pada tabel 4, terlihat bahwa uji t menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap upah minimum

kabupaten/kota, ditandai dengan probabilitas sebesar  $0.0000 < 0.05$ . Selain itu, nilai probabilitas variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berpengaruh signifikan dengan probabilitas  $0.0018 < 0.05$ . Demikian pula, variabel Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan pengaruh signifikan dengan probabilitas  $0.0168 < 0.05$ . Hasil uji F menunjukkan probabilitas F-statistik sebesar  $0.000000 < 0.05$ , menunjukkan bahwa variabel independen (IPM, TPAK, IHK) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah. Koefisien determinasi pada model menunjukkan nilai Adj.R-Squared sebesar 0.936965, yang menunjukkan bahwa 93,6% variasi dalam upah minimum kabupaten/kota dapat dijelaskan oleh IPM, TPAK, dan IHK. Sisanya, sebesar 6,4%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model tersebut.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan kebutuhan statistik yang krusial. Pada penelitian ini menerapkan 3 jenis uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi linier memenuhi sejumlah asumsi penting, termasuk distribusi residu yang normal, homoskedastisitas, kolinearitas yang minim. Oleh karena itu, uji ini membantu menjamin validitas dan keandalan model statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 5 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik	Ouput	Keterangan
Uji Multikolineritas		
Indeks Pembangunan Manusia	-0.065218	Nilai signifikan $< 0.8$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	-0.089527	
Indeks Harga Konsumen	-0.027018	
Uji Heterokedastisitas		
Indeks Pembangunan Manusia	0.0532	Nilai signifikan $> 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	0.6947	
Indeks Harga Konsumen	0.0690	
Uji Normalitas		
Probability	0.857444	Nilai signifikan $> 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal

Sumber: Olah Data Eviews 10

Dari tabel 5, Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model berkorelasi atau tidak. Hasil pengujian multikolinearitas terlihat bahwa koefisien korelasi antara variabel independen  $< 0.8$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas dalam model regresi tersebut.

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah variance residual model antar data bervariasi, dengan menggunakan uji glesjer. Hasil uji Glejser memiliki nilai probabilitas  $> 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pelanggaran heterokedastisitas dalam model regresi tersebut.

Uji normalitas adalah untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi variabel penelitian model. Hasil uji normalitas bahwa nilai probability  $0.857444 > 0.05$  maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

### Pembahasan

#### Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Menurut Prayogo & Hasmarini (2022), menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pencerminan dari kualitas sumber daya manusia. Terdapat hubungan langsung antara tingkat produktivitas tenaga kerja penduduk dan nilai IPM yang rendah. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah sering menjadi penyebab keterbatasan pendapatan. Berdasarkan hasil regresi data panel yang dilakukan



menyampaikan temuan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2014-2023. Hal ini, dapat diartikan ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan maka penetapan upah minimum kabupaten/kota juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan, maka penetapan upah minimum kabupaten/kota juga cenderung turun.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja di antara penduduk setempat. Ini karena masyarakat akan lebih mampu mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai peluang pembangunan lainnya sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif. Peningkatan produktivitas ini secara langsung berdampak pada pendapatan individu karena peningkatan keterampilan dan produktivitas membuat pekerja lebih berharga dan lebih mampu menuntut upah yang lebih tinggi, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, peningkatan indeks pembangunan manusia berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan individu serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hasil ini, didukung penelitian sebelumnya oleh Damanik & Zalukhu (2021) yang menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Kota Pematangsiantar.

Sebaliknya, penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki potensi terjadinya penurunan produktivitas tenaga kerja di antara penduduk setempat. Ini karena masyarakat memiliki akses yang kurang terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai peluang pembangunan lainnya sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja yang kurang terampil dan produktif. Penurunan produktivitas ini secara langsung berdampak pada pendapatan individu karena menurunnya keterampilan dan produktivitas membuat pekerja kurang berharga dan kurang mampu untuk menuntut upah, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terbentuknya lingkungan ekonomi yang kurang adil dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, peningkatan IPM sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### **Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Menurut Haspa et al (2023) menyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan kerja dan jumlah total orang dalam kelompok usia kerja yang sama. Berdasarkan hasil regresi data panel yang dilakukan menyampaikan temuan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2014-2023. Hal ini, dapat diartikan ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan maka penetapan upah minimum kabupaten/kota juga cenderung meningkat. Sebaliknya, ketika Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan, maka penetapan upah minimum kabupaten/kota juga cenderung turun.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serikat pekerja atau organisasi pekerja sehingga mereka menggunakan kekuatan bersama untuk memperjuangkan upah minimum yang lebih tinggi bagi pekerja. Dengan bertambahnya jumlah anggota mereka, kekuatan bernegosiasi dengan perusahaan juga meningkat. Hal ini menambah peluang mereka dalam mencapai kesepakatan tentang upah dan kondisi kerja yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, peningkatan TPAK berkontribusi terwujudnya upah minimum yang lebih tinggi dan perbaikan kondisi kerja secara keseluruhan.

Sebaliknya, penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menyebabkan berkurangnya kesadaran dan kekuatan serikat pekerja atau organisasi pekerja membuat kesulitan dalam memperjuangkan upah minimum yang lebih tinggi bagi pekerja. Akibatnya, dapat melemahkan peluang untuk mencapai kesepakatan upah dan kondisi kerja yang lebih menguntungkan. Dengan demikian, penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja dapat

menghambat perjuangan untuk upah minimum yang lebih tinggi ataupun dapat mengakibatkan penurunan dalam penetapan upah minimum.

### **Pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**

Menurut Wulandari & Habra (2020) menyatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah tingkat perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat secara keseluruhan selama periode waktu tertentu yang telah ditetapkan. Hasil regresi data panel pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode 2014-2023. Hal ini, dapat diartikan ketika Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami peningkatan maka penetapan upah minimum kabupaten/kota cenderung turun. Sebaliknya, ketika Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami penurunan maka penetapan upah minimum kabupaten/kota cenderung meningkat.

Peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pengendalian kenaikan IHK dilakukan melalui penurunan upah minimum. Dengan menurunkan upah minimum dapat mengurangi biaya produksi bagi perusahaan sehingga mencegah terjadinya inflasi. Sebaliknya, Jika Indeks Harga Konsumen (IHK) turun, pemerintah mungkin memutuskan untuk meningkatkan upah minimum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan upah minimum, pekerja akan memiliki lebih banyak pendapatan untuk dihabiskan dapat mendorong permintaan konsumen dan pertumbuhan ekonomi.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peningkatan IPM dapat mendorong kenaikan upah minimum melalui peningkatan produktivitas. Sebaliknya, ketika IPM rendah, menandakan produktivitas masyarakat yang rendah, yang dapat menyebabkan penurunan upah minimum. Meningkatnya TPAK dapat mendorong kenaikan upah minimum karena memperkuat kemampuan serikat pekerja dalam memperjuangkan upah minimum yang lebih tinggi. Sebaliknya, berkurangnya TPAK dapat mengakibatkan penurunan upah minimum karena serikat pekerja dengan keanggotaannya yang sedikit akan kesulitan dalam memperjuangkan upah minimum. Di sisi lain, Indeks Harga Konsumen (IHK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah. Peningkatan IHK dapat mendorong pemerintah untuk menurunkan upah minimum, yang tujuannya untuk menurunkan biaya produksi perusahaan sehingga tidak terjadi inflasi. Sebaliknya, penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dapat mendorong pemerintah untuk menaikkan upah minimum tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan merangsang aktivitas ekonomi.

#### **Saran**

Berdasarkan penelitian ini, penulis mengharapkan pemerintah mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat di Jawa Tengah sebagai upaya peningkatan produktivitas kerja penduduk, yang pada gilirannya mengakibatkan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, perlu adanya strategi peningkatan partisipasi angkatan kerja melalui program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional perlu diperkuat. Hal ini dikarenakan semakin tingginya permintaan tenaga kerja dan produktivitas kerja dapat mendorong adanya kenaikan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari perubahan kebijakan indeks harga konsumen terhadap upah minimum di Jawa Tengah dengan pengolahan inflasi yang mempertimbangkan keseimbangan antara kenaikan harga barang dan jasa dengan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga terciptanya keseimbangan perekonomian.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ayuningtyas, A., & Islami, F. S. (2022). Analisis Perkembangan Penduduk Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 167–188. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.281>
- Daniel Collyn Damanik, & Rika Surianto Zalukhu. (2021). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penetapan Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Di Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v3i1.119>
- Fauzan, M., Nusantara, A., Nawatmi, S., & Agus Budi Santosa. (2020). Indeks Pembangunan Manusia dan Pendidikan di Jawa Tengah. *Jbe*, 27(1), 49–58.
- Haspa, N. H., Hailuddin, & Satarudin. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics and Business*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v9i1.126>
- Helvira, R., & Rizki, E. P. (2020). Pengaruh Investasi, Upah Minimum, dan IPM terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, 1(1), 53–62.
- Konarasinghe, K. M. U. . (2020). Forecasting Consumer Price Index in Thailand under the COVID -19 Pandemic. *Proceedings of Institute of Mathematics and Management Conference on Management & Social Sciences (IMMCMSS)*.
- Kusumaningrum, R. R., & Nurhayati, S. F. (2023). Analisis Pengaruh Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Karesidenan Pekalongantahun 2017-2021. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 3(5), 859–867.
- Ladi, T., Mahmoudpour, A., & Sharifi, A. (2021). *Assessing impacts of the water poverty index components on the human development index in Iran*. 113(June).
- Messina, J., & Silva, J. (2021). Twenty Years of Wage Inequality in Latin America. *World Bank Economic Review*, 35(1), 117–147. <https://doi.org/10.1093/wber/lhz029>
- Mutmainnah, M., & Mahfiah, M. (2023). Consumer Price Index And Inflation On Bi-7 Day Reverse Repo Rate. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 12(2), 197–208. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v12i2.1409>
- Prayogo, I., & Hasmarini, M. I. H. (2022). SEIKO : Journal of Management & Business Analisis Pengaruh IPM, Upah Minimum, PDRB dan Jumlah Penduduk Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Yogyakarta Tahun 2018-2021. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 5(2), 77–85. <https://doi.org/10.37531/sejaman.vxix.3455>
- Primadila, B., & Asmara, K. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kota di Kota Banjarmasin. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 19(1), 30. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v19i1.8003>
- Ramdhansya, D. R., & Indrawati, L. R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Regional Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 281–297. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.102>
- Ramli, B. (2024). *YUME: Journal of Management Pengaruh Upah Minimum , Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Bulukumba*. 7(1), 211–221.
- Riyani, D., & Citra. (2020). Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penetapan Upah Di Kabupaten Berau Tahun 2011-2019. *Eco-Build Jurnal*, 4(2), 44–54.
- Setya Budi, A. D. A., Septiana, L., & Panji Mahendra, B. E. (2024). Memahami Asumsi Klasik dalam Analisis Statistik: Sebuah Kajian Mendalam tentang Multikolinearitas, Heterokedastisitas, dan Autokorelasi dalam Penelitian. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(01), 01–11. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i01.878>
- Third, T., Conference, I., & Anwar, I. (2023). *How Wages Affect The Behavioral Tendency Of*. 1, 1–12.



Wulandari, S., & Habra, M. D. (2020). Pengaruh Indeks Harga Konsumen Terhadap Inflasi Di Kota Medan. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2019*, 86, 120–126.

